

KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES

MUDIYATI RAHMATUNNISA¹, RATNIA SOLIHAN², FAUZI GHUFRONI³

^{1,2,3}*Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia*

³fauzi17007@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Regional heads leadership is one of the important factors in realizing gender mainstreaming. By using qualitative methods, this study analyzes the leadership of regional heads in reducing cases of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). This research is focused on revealing the socio-political, political and leadership conditions of the Brebes regional heads, and gender responsive policies related to maternal and child health to reduce the number of MMR and IMR in Brebes Regency. This study found that the regional heads of Brebes emerged from business circles whose emergence was due to the kinship factor. In realizing gender mainstreaming, there are still policies that are still adopted from the central government, meaning that researchers have not found any initiatives or concepts in the form of policies that are purely regional heads as actors who are authorized to implement policies to reduce MMR and IMR cases. However, the Regional Heads of Brebes benefit from active bureaucratic work and innovation, then the composition of the faction seats in the DPRD, as well as NGOs that become their partners in providing input, communication and active contributions in maternal and child health.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Daerah, Pengarusutamaan Gender, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Kesehatan Ibu dan Anak.

REGIONAL HEAD LEADERSHIP IN REALIZING GENDER MAINSTREAMING IN BREBES DISTRICT

ABSTRAK

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimpinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculannya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokrasi yang aktif dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak.

Keywords: Leadership, Regional Heads, Gender Mainstreaming, Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR), Maternal and Child Health.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi komponen yang sangat erat kaitannya untuk memperbaiki kualitas generasi berikutnya. Sebagaimana pemerintah mulai menyadari bahwa peran perempuan sangat penting dalam

pembangunan dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, di mana semua menjadi tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pencegahan kekerasan. Sebagaimana strategi PUG menjadi bagian untuk mencapai target ke-5 dari SDGs agar semua kelompok masyarakat terutama perempuan bisa

memperoleh hasil dari pembangunan. Dasar pembangunan inilah yang menjadi dasar bagi isu kesehatan ibu dan anak untuk bisa memprioritaskan masalah gender di dalam sebuah kebijakan, apalagi dengan adanya PUG menjadi langkah strategis untuk mencapai kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dapat tercipta dengan memperhatikan pemenuhan atas hak dan kewajiban tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender. Perbaikan kehidupan perempuan dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Adapula, nawacita Jokowi-Ma'ruf Amien yakni prioritas pembangunan SDM sebagaimana pembangunan SDM dianggap bisa menjadi kunci Indonesia ke depan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Hal ini menjadi rujukan bagi setiap daerah untuk saling mensinergikan dalam setiap kebijakan dan program atas isu gender.

Peneliti menyadari konsep kepemimpinan dan kebijakan merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya dapat saling berpengaruh, di mana kepemimpinan membangun karakter kepemimpinannya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, gaya kepemimpinan yang diterapkan serta bagaimana pemimpin membangun relasi terhadap partai politik, fraksi DPRD, struktur birokrasi, dan LSM. Kemudian dalam mewujudkan PUG melalui kebijakan yang responsif gender; bagaimana opsi-opsi pokok yang menjadi pertimbangan kepala daerah untuk menjadikan kebijakan, program dan kegiatan yang kemudian di implementasikan selama periode kepemimpinannya. Dalam hal ini, kajian politik klasik seringkali politik dianggap bias gender bahkan membangun asumsi dasar yang tidak netral gender dan mengabaikan pengalaman perempuan sebagai subjek. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus menjadi kritik atas bias gender dari literatur politik klasik.

Di kabupaten Brebes, melalui kepemimpinan Kepala Daerah Idza Priyanti telah menerima penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat utama di tahun 2018 (Redaktur Brebes News, 2013) Di mana penghargaan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perempuan dan anak terkait pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP-PA). Selain itu, pemerintah dianggap memiliki bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan laki-laki dan perempuan, sebagai upaya dari pelaksanaan PUG yang berkaitan dengan penghargaan terbaru di tahun 2019; perihal Anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA) (Redaktur Brebes News, 2019). Mengacu pada pendapat Alfian (2008) peneliti berasumsi bahwa prestasi ini tidak terlepas dari adanya kepemimpinan kepala daerah Brebes dalam mengelola kebijakan terkait perempuan dan anak, sesuai dengan konstruksi yang

dibuat oleh Eales-White.

Verlo (2001), Hannan (2001) dan Woodward (2003) juga mencatat dalam sebuah kebijakan gender, nilai yang terpenting terletak pada komitmen negara dan organisasi serikat perempuan untuk bisa menjalankannya. Demikian, menghasilkan kebijakan gender perlu didukung faktor kepemimpinan, dukungan keuangan dan keahlian teknis, namun yang paling penting faktor kepemimpinan atau kemauan politik akan lebih menggerakkan sebuah kebijakan gender meskipun hasilnya bisa saja berhasil ataupun gagal. Berkaitan dengan faktor kepemimpinan Mickey dan Bilton (2000) memulai dengan sebuah titik awal, apabila kepala daerah mulai menempatkan kesetaraan gender sebagai komponen penting dari sebuah kebijakan berkelanjutan maka akan menjadi pengakuan formal di masyarakat. Demi memperbaiki ketidaksetaraan gender, semua pemangku kepentingan pemerintah beserta organisasi serikat perempuan ikut bertanggung jawab demi kemajuan perempuan, di mana posisi para pemimpin harus berkomitmen untuk mendukung proses PUG serta semua staffnya bertanggung jawab untuk memahami peran dan tanggung jawabnya terkait masalah yang sedang dibahas atau diidentifikasi (Karimi, 2016).

Dalam bidang kesehatan, Kasus Angka Kematian Ibu (AKI) di Brebes menjadi kasus yang yang menempati urutan pertama di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh mulai tahun 2014-2021 masih menduduki peringkat AKI tertinggi dengan rincian di tahun 2013 yakni 61 kasus, 2014 yakni 73 kasus, 2015 yakni 52 kasus, 2016 yakni 54 kasus, 2017 mencapai 31 kasus, tahun 2018 ada 30 kasus, tahun 2019 ada 37 kasus, tahun 2020 ada 62 kasus, dan tahun 2021 mencapai 105 kasus (Dinas Kesehatan, 2020). Di lanjutkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Brebes, mulai di tahun Tahun 2013 ada sekitar 350 kasus, tahun 2014 yakni 348, tahun 2015 yakni 342, tahun 2016 yakni 444, tahun 2017 yakni 397, tahun 2018 yakni 325, tahun 2019, yakni 302, dan di tahun 2020 yakni 297 kasus (Dinas Kesehatan, 2020).

Berdasarkan pencapaian kabupaten Brebes yang pernah mendapatkan APE tingkat utama sebanyak tiga kali sejak 2016, 2018 dan 2018, namun permasalahan kesehatan khususnya AKI dan AKB masih tinggi. Permasalahan tersebut bisa disebabkan adanya kesenjangan gender dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, perhatian khusus terkait kondisi pelayanan kesehatan, bantuan kesehatan, dan fasilitas kesehatan dalam melihat ketimpangan akses terhadap perempuan maupun laki-laki harus diperhatikan. sebagaimana WHO (2010) telah mengisyaratkan agar tidak ada seorang pun yang berhak jatuh sakit atau sampai meninggal akibat ketimpangan gender yang terjadi.

Kajian ini dilatarbelakangi perkembangan politik lokal di Indonesia pascareformasi, melalui

mekanisme Pilkada langsung sejak 2005-2019 membuat masyarakat memilih hak pilihnya sendiri untuk memilih pemimpinnya berdasarkan kapabilitas maupun komitmen politiknya. Kepala daerah yang dipilih secara langsung mewarnai dinamika politik lokal, terutama diperkenalkannya Inpres No.9/2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Di mana kepemimpinan kepala daerah memiliki peran dan posisi strategis untuk menangani persoalan kepentingan praktis gender maupun kepentingan strategis gender. Hal ini, agar tidak ada pengabaian terhadap gender dalam analisis politik melalui kepemimpinan kepala daerah. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyoroti bagaimana kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan PUG khususnya bidang kesehatan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB di Brebes.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di kabupaten Brebes. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada kepemimpinan kepala daerah sebagai seseorang yang berwenang untuk mewujudkan PUG khususnya dalam bidang kesehatan atas dasar permasalahan AKI dan AKB di kabupaten Brebes pada masa kepemimpinan Idza Priyanti. Dengan demikian, penelitian kualitatif menelaah dan mendekati terkait persoalan fenomenologi dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulisan), ucapan, isyarat, pengalaman, dan peristiwa yang dapat diamati. (Aminah & Roikan, 2019).

Fenomena yang diangkat adalah kepemimpinan Kepala Daerah Idza Priyanti (2012-2017 dan 2017-2022). Namun karena Idza Priyanti tidak berkenan untuk diwawancarai, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari media youtube dari wawancara dengan Tribun Jateng dan Webinar dari Universitas Terbuka (UT) yang digunakan untuk mendukung penelitian, serta dilakukan pula wawancara mendalam dari mitra kerjanya selama periode kepemimpinannya.

Dalam melakukan wawancara mendalam (indepth interview) peneliti menggunakan panduan berupa pedoman wawancara yang terstruktur kepada setiap informan penelitian berdasarkan kapasitasnya sesuai latar belakangnya. Karena subjek dalam penelitian ini adalah multistakeholder yang berperan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di

kabupaten Brebes. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive. Teknik purposive, ini mengkhususkan informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana penelitian lebih cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sulopo, 2003). Peneliti juga menggunakan teknik snowball karena membantu peneliti untuk menemukan informasi baru yang berkompeten dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti, maka peneliti menentukan langsung siapa saja yang menjadi informan penelitian. Sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 SKPD (Bapertlitbangda, DP3KB, Dinas Kesehatan), 1 orang dari Anggota DPRD Komisi IV, Organisasi Perempuan (GOW), 2 LSM (Forum Masyarakat Madani dan Eska Unggul), 1 Akademisi dari UNSOED, Pengamat politik sekaligus mitra kerja bupati Brebes (Mantan Sekertaris Daerah 2013-2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KONDISI SOSIAL-POLITIK

Secara umum, kondisi topografi berupa pesisir dan pegunungan, kondisi wilayah perkotaan dan pedesaan sama sama menyumbang angka yang mengakumulasi tingginya kematian ibu dan bayi. Pertama, Zona Selatan meliputi daerah pegunungan Baribis dan Kumbang (Suku Sunda) dan sebagian kaki Gunung Slamet (Suku Jawa), seperti kecamatan Salem, Bantarkawung, Banjarharjo, Bumiayu, Tonjong, Sirampog dan Paguyangan. Merupakan wilayah yang masih menjunjung nilai gotong-royong, guyub, sederhana, santun dan dianggap lebih responsif terhadap kegiatan ataupun program dari pemerintah daerah. Zona Selatan dianggap unik karena terdapat dua kebudayaan yang berbeda yakni Sunda dan Jawa

Kedua, Zona Tengah meliputi kecamatan Ketanggungan, Larangan, Songgom, dan Jatibarang, secara topografi zona tengah peralihan dari pegunungan dan pertanian yang subur sehingga karakteristik masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Karena wilayah peralihan masyarakatnya sebagian memiliki perhatian terhadap kegiatan dan program pemerintah daerah, selebihnya cenderung keras karena pengaruh karakter pesisir.

Ketiga, Zona Utara yang dikenal wilayah pesisir, seperti Brebes, Wanasari, Bulakamba, Kersana, Tanjung dan Losari. Karakter masyarakat yang cenderung keras dan terbuka karena mereka

lekat dengan wilayah perairan dan mata pencahariannya nelayan dan sebagai bertani. Karakteristik tersebut membuat masyarakat pesisir cenderung tidak ingin di kontrol. Sejarahnya, ditandai dengan bertemu dan interaksinya dengan

Secara politik, perubahan peta politik di Kabupaten Brebes dapat dilihat di Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Fraksi dalam DPRD Kabupaten Brebes; 2009, 2014 dan 2019

Fraksi	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
PDI-P	13 orang (26%)	11 orang (22%)	13 orang (26%)
PKB	8 orang (16%)	8 orang (16%)	9 orang (18%)
Golkar	7 orang (14%)	7 orang (14%)	7 orang (14%)
Gerindra	2 orang (4%)	5 orang (10%)	6 orang (12%)
PKS	5 orang (10%)	6 orang (12%)	4 orang (8%)
PPP	4 orang (8%)	3 orang (6%)	4 orang (8%)
Demokrat	6 orang (12%)	4 orang (8%)	3 orang (6%)
PAN	4 orang (8%)	5 orang (5%)	3 orang (6%)
Hanura	1 orang (2%)	1 orang (2%)	1 orang (2%)
PDK	1 orang (2%)	-	-
Jumlah Anggota	50 orang	50 orang	50 orang
Jumlah Partai	10	9	9

Sumber: DPRD Kabupaten Brebes.

Dalam menjalankan kebijakan yang responsif gender memang tidak lepas dari modal politik, dukungan dari partai pengusung PDIP mempengaruhi kinerja seorang kepala daerah di tingkat DPRD karena semakin banyak partai yang menduduki kursi legislatif dan semakin terfragmentasi sikap mereka, maka akan semakin sulit pula seorang kepala daerah meloloskan kebijakan atau program yang dirintisnya. Begitu pula, apabila semakin jumlah partai pengusung di DPRD dan semakin bersatunya sikap para anggota dari fraksi tersebut (melalui koalisi), maka akan memudahkan pula seorang kepala daerah meloloskan kebijakan atau programnya menjadi peraturan daerah.. Dengan demikian, apabila kepala daerah Brebes ingin mengutamakan kebijakan pro-kepentingan praktis melalui penurunan kasus AKI dan AKB karena dianggap cukup populis di kalangan masyarakatnya, maka isu tersebut baik kebijakan, kegiatan, maupun program potensi untuk ditentang oleh DPRD Brebes relatif kecil.

2. POLITIK DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

Idza Priyanti merupakan bupati yang menjadi aktor politik dalam kajian ini, beliau adalah bupati perempuan pertama di Kabupaten Brebes, sekaligus menjadi bupati ke-31. anak pasangan H.

etnis Tionghoa yang dianggap masyarakat baru, hingga membuat persinggungan antara pendatang dan penduduk pesisir. Kemudian melahirkan pola interaksi yang turun-temurun, yakni terbuka dan terus terang dalam mengungkapkan perasaanya.

Ismail dan Hj. Rukhayah yang memiliki latar belakang pebisnis transportasi PO. Dewi Sri yang menguasai wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah dan berpusat di Kota Tegal. Ayahnya H. Ismail merupakan orang asli Brebes dari desa Randusanga Kulon, Brebes. Kemudian menikah dengan kalangan Polri yakni AKBP Warsidin, setelah menikah Idza Priyanti ikut dengan suami dan tinggal di daerah Pesurungan Kulon, Kota Tegal. Keseharian Idza Priyanti adalah menjalankan bisnis keluarganya kemudian dirinya mulai naik posisi sebagai Direktur Utama PO. Dewi Sri karena adiknya Ikmal Jaya ikut berkompetisi pada Pilkada Langsung di Kota Tegal. Tahun 2011 menjadi awal karir politiknya, karena memperoleh suara 42 suara dalam rapat paripurna DPRD di tanggal 25 Agustus 2011.

Di dalam penelitian Dewi (2015) memberikan simpulan bahwa kemunculan perempuan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada langsung merupakan kader partai yang memiliki ikatan kekerabatan. Figur politiknya adalah laki-laki di dalam keluarganya, ikatan ini dimanfaatkan sebagai penerus politik misalnya saja di tingkat eksekutif. Patron laki-laki bisa dikatakan memberikan pengaruh kuat, namanya hadir karna memiliki ikatan kekerabatan, bahkan sampai memfasilitasinya untuk bisa memenangkan

konstestasi politik. Ikatan kekerabatan dari Kepala Daerah Idza Priyanti bermula karna faktor sang ayah (pengusaha transportasi) dan adiknya (Walikota Tegal). Lebih detail, ikatan kekerabat yang dimaksud yakni sang ayah yang bernama H. Ismail AD adalah pengusaha jasa transportasi angkutan darat yang dikenal dengan PO. Dewi Sri. Nama ayahnya sudah dikenal sebagai seorang pebisnis di wilayah Pantura Jawa Tengah. Bisnis otobus tersebut sudah beroperasi sejak 1980-an hingga menjadi oligarki lokal mulai dari wilayah Brebes, Tegal Raya, Pemalang sampai Pekalongan.

Analisis akan faktor ikatan kekerabatan dari Richter (1990-1991) menjadi acuan bahwa patron laki-laki (ayah dan adik) ikut berpengaruh dalam pilkada lokal, bekerjanya ikatan kekeluarga membuat figur baru ikut terbantu secara fasilitas dan figur patron yang sudah ada terlebih dahulu sukses. Nama Idza Priyanti sudah terbangun sebagai anak dari H. Ismail pengusaha bisnis transportasi Dewi Sri dan kakak dari Ikmal Jaya (Walikota Tegal 2009-2014), patron tersebut mempermudah pula untuk masuk di dalam kandidasi melalui PDIP sebagai partai pengusung. Sementara itu, ikatan kekerabatan ini akhirnya terbentuk dan berubah menjadi dinasti politik lokal yang dikuasai oleh pewaris Dewi Sri. Wilayah pemalang oleh Muti Agung Prabowo sebagai kepala daerah (2021-2025), Kota Tegal oleh Ikmal Jaya dan Idza Priyanti dua periode di Brebes (2017-2022).

Fenomena dari ikatan kekerabatan menjadi populer di tingkatan lokal akibat dari adanya asas desentralisasi, seseorang yang memiliki *power* dan pengaruh di suatu daerah bisa membentuk oligarki di tingkatan lokal, bahkan asas desentralisasi yang di maksud untuk mendorong sistem demokratisasi lokal nyatanya dikuasai oleh ikatan kekerabatan. Kita bisa melihat bahwa ketiganya bisa menduduki jabatan strategis wilayah Pantura. Selain itu, sosok Idza Priyanti menjadi pembaharuan kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Brebes yang selalu di pimpin oleh laki-laki. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kepemimpinan memang netral dengan jenis kelamin atau gender, namun ini menjadi hal yang menarik selain masa jabatannya yang sedang berlangsung. Karir politiknya berjalan dengan mulus sampai dua periodenya. meskipun ditengah budaya Jawa yang masih memegang kuat peran laki-laki yang dianggap pantas memimpin dan mengambil keputusan yang membawa konsekuensi perempuan dianggap tidak ideal, tentu ini menjadi penghambat keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan politis dalam suatu negara.

Peneliti menyadari bahwa hubungan kepemimpinan kepala daerah di Brebes tidak bisa menghilangkan identitas tunggal dari jenis kelaminnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri atas capaiannya sebagai kepala daerah yang telah memimpin masyarakat Brebes selama dua periode (2012-2017 dan 2017-2022). Kepemimpinannya di

era reformasi melalui Pilkada langsung menuntutnya untuk memiliki sensitifitas gender di dalam setiap kebijakan dan *mindset* politiknya seperti memiliki gagasan, visi kedepan, strategi untuk merealisasikannya, bukan *mindset* sebagai pebisnis yang *profit oriented* karena akan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan *non-profit oriented*.

Adanya Pilkada langsung memang memfasilitasi munculnya perempuan pemimpin yang lahir dari latar belakang yang berbeda, seperti dari kalangan pebisnis. Seperti yang dikatakan Jeffrey Winters menempatkan oligarki memiliki dasar kekuasaan yakni kekayaan material (basis oligarki) dan oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik. Kemunculan Idza Priyanti yang secara modal sosial kurang dan modal politik yang singkat menghubungkan dalam konsep dinamika politik oligarki pada saat itu (2012). Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia memang begitu membuka peluang dan akses terhadap proses politik yang dianggap setara bagi siapapun

Karakter budaya jawa dari Idza Priyanti ikut berpengaruh karena pembawaan beliau cenderung tenang, bahkan "*kemayu*" sebagaimana perempuan Jawa. Menjadikan gaya kepemimpinan yang demokratis dianggap lebih kekinian di dalam budaya politik era-reformasi, dibandingkan gaya kepemimpinan meledak-ledak dan kurang menghargai harkat martabat kepada bawahannya. Idza Priyanti juga memiliki pandangan terbuka akan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk di manfaatkan, demi kepentingan bersama dan sasaran yang telah di prioritaskan yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan AKI dan AKB menunjukkan bagaimana kapabilitas kepala daerah untuk bisa menggali masalah dan alternatif solusi yang sifatnya *bottom-up*. Apalagi dihadapkan dengan heterogenitas masyarakat Brebes, yakni Jawa dan Sunda. Serta topografi yang melintang dari pegunungan sampai pesisir. Pada akhirnya menempatkan posisi perempuan dan laki-laki ikut berpartisipasi dalam menangani kasus AKI dan AKB di Brebes.

Diketahui bahwa Idza Priyanti di awal kemunculannya modal sosial yang dimiliki sebagai isteri dari anggota Polri. Jejaring dengan GOW hanya sekadar mitra kerja pemerintah. Selebihnya modal sosial Idza Priyanti mulai terbangun pada saat menjabat di periode pertamanya (2012-2017), seperti masuk dalam muslimat Nahdatul Ulama (NU), PKK, dan kalangan keagamaan lainnya dengan menghadiri setiap acara dalam rangka peringatan besar Islam. Aspek modal sosial kedua yakni norma timbal balik khususnya dari organisasi perempuan. Seperti GOW yang membawahi semua organisasi perempuan; Fatayat NU, Aisyiah, dan Sekar Tantri akhirnya memupuk hubungan baik, bahkan hampir selesainya periode Idza Priyanti di

2022 komunikasi politiknya baik dan anggaran bagi GOW terjalin dengan baik.

Kemunculan Idza Priyanti memang sempat tidak mendapatkan dukungan dari organisasi perempuan. Namun dari adanya norma timbal balik di periode pertama masa jabatannya (2012-2017) pada akhirnya banyak masa yang mendukung pertahana tak terkecuali dari kelompok organisasi perempuan karena memupuk komunikasi yang baik dan persoalan anggaran yang lancar serta apabila ada setiap acara berusaha untuk hadir. Kepala Daerah Idza Priyanti memiliki komitmen dan kompetensinya dalam menggerakkan mesin birokrasi dalam menginovasi dalam pelayanan publik dan keterlibatan organisasi masyarakat lewat gerakan *kawal wong meteng* dengan Eska Unggul untuk pendampingan KIA di tiap kecamatan. Serta memberikan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan menyukseskan program KB untuk menekan AKI dan AKB.

Kepala daerah Idza Priyanti diuntungkan dengan inovasi dan kerja birokrasi yang aktif untuk melakukan inovasi dan kerja birokrasi yang aktif untuk melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan dan fasilitas kesehatan. Pembahasan dalam penelitian ini menemukan; peranan penting dari aparat birokrasi dalam menangkap dan mengejawantahkan kepemimpinan kepala daerah yang sudah memperlihatkan keberpihakan pada persoalan kehatan ibu dan anak di daerah.

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Eska Unggul yang bergerak dalam Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebenarnya memiliki kemampuan dalam menggerakkan KIA di level desa. Hal ini, memberikan pendampingan dan edukasi serta memfasilitasi apa yang seharusnya dilakukan bagi ibu hamil yang resti. Selain itu, kemunculan aktor yang bergerak secara sukarela seperti Khamili di desa Kaligiri Kecamatan Sirampog menjadi modal sosial bagi kepala daerah untuk bisa menggerakkan masyarakat di level desa ataupun memanfaatkan kehadiran Eska Unggul dalam persoalan AKI dan AKB.

Modal politik dalam kemampuan menjalin komunikasi, bernegosiasi, bekompromi serta menggunakan jejaring yang dimiliki Idza Priyanti terlihat dari hubungan komunikasi politik yang baik dengan para anggota DPRD terutama komisi IV

yang mengurus kesejahteraan sosial dan kesehatan. Dengan merubah terminal Ketanggungan yang terbelengkalai di dimanfaatkan untuk dijadikan rumah sakit untuk wilayah tengah Brebes. Hal ini dianggap untuk menghemat anggaran serta posisi yang strategis. Meskipun RSUD Ketanggungan masih di tipe D setidaknya masyarakat di wilayah tengah Brebes, seperti kecamatan Ketanggungan, Larangan, Songgom, Banjarharjo bisa menjangkau fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak.

Apalagi di dalam sistem presidensial, setiap kebijakan atau program adalah hasil dari kesepakatan antar eksekutif dan legislatif. Dukungan dari partai politik seperti fraksi PDIP di DPRD menjadi modal politik dalam mendukung sepenuhnya kebijakan dari kepala daerah. Sebuah gambaran bahwa anggota legislatif dari partai pengusung memberikan kemampuan untuk bernegosiasi dan berkompromi, yang berpengaruh dalam menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan RSUD di kecamatan Ketanggungan

3. KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER

Salah satu usaha untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus indikator SGDs ke 3 yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan adalah menciptakan program peningkatan jumlah kelahiran yang ditolong dengan tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Kesemuanya adalah komitmen untuk bisa mengurangi AKI serta meningkatkan derajat.

Bagi pemerintah daerah Brebes, wilayah pesisir menjadi tantangan tersendiri di mana karakteristik masyarakatnya yang cenderung keras, tidak bisa dikontrol, dan masih mempercayai pengalaman dari orang lain yang kemudian menjadi mitos bagi lingkungan keluarganya. Pada akhirnya ketika pemerintah daerah ingin menjalankan program atau kegiatan memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk melunakkan karakter masyarakat pesisir. Topografi yang berbeda dan karakteristik masyarakat yang beragam akhirnya berkontribusi pada AKI dan AKB yang dapat di kelompokkan menjadi seperti berikut:

Tabel 2. Tabel Angka Kematian Ibu

No.	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Salem	8	2	1	1
2.	Bantarkawung	2	0	1	5
3.	Bumiayu	0	3	2	6
4.	Paguyangan	0	3	3	4
5.	Sirampog	3	0	0	3
6.	Tonjong	2	0	1	4
7.	Songgom	0	2	0	3
8.	Jatibarang	2	0	0	0
9.	Larangan	8	7	3	8

10.	Ketanggungan	3	4	5	8
11.	Banjarharjo	1	4	5	8
12.	Kersana	0	0	2	3
13.	Losari	2	5	6	13
14.	Tanjung	3	1	5	7
15.	Bulakamba	1	2	9	10
16.	Wanasari	3	1	12	10
17.	Brebes	0	3	7	12
Total		30	37	62	105

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia 1 tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan hitungan banyaknya kematian bayi yang berusia dibawah satu tahun. Dalam hal ini, AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status

gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan serta menggambarkan keadaan sosial-ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Demikian, pemetaan AKB tahun 2018-2020 berdasarkan persebaran tiap kecamatan untuk mengetahui zona tertinggi terkait kasus AKB di Brebes.

Tabel 3. Tabel Angka Kematian Bayi

No.	Kecamatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Salem	24	13	14
2.	Bantarkawung	14	12	7
3.	Bumiayu	21	27	14
4.	Paguyangan	15	13	15
5.	Sirampog	3	6	5
6.	Tonjong	5	5	4
7.	Songgom	4	2	3
8.	Jatibarang	20	21	0
9.	Larangan	22	19	6
10.	Ketanggungan	18	33	38
11.	Banjarharjo	33	25	29
12.	Kersana	3	2	6
13.	Losari	35	28	23
14.	Tanjung	21	27	20
15.	Bulakamba	21	18	33
16.	Wanasari	24	14	17
17.	Brebes	42	37	49
Total		325	302	297

Sumber: Dinas Kesehatan Brebes

Data dan informasi terkait komitmen dan kemampuan kepala daerah dalam mewujudkan PUG terkait isu AKI dan AKB di kabupaten Brebes diperoleh dari rekapan data tahun 2018 pada saat penilaian Anugeran Parahita Ekapraya (APE). Peneliti menyadari dengan adanya penghargaan berupa APE memang tidak menjadi tolak ukur terciptanya kesetaraan gender di kabupaten Brebes. Namun demikian, melalui penilain dari APE berupa data dan informasi serta prakarsa dan prestasi kabupaten Brebes apalagi telah mendapatkan kategori tingkat utama sejak 2018 (peletakan dasar dan keberlanjutan untuk tingkat yang paling tinggi yakni mentor) menjadi indikator penilaian atas komitmen dalam menjalankan PUG salah satunya dalam bidang kesehatan.

Komitmen kabupaten Brebes dalam mewujudkan PUG yang berkaitan dengan kesehatan yakni Nomor 10 tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes, Peraturan bupati telah dimunculkan lewat Perbup No. 122 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Brebes. Perbup No. 26 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Melalui Maklumat Dukun Bayi. Perbup Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Brebes, Perbup Brebes No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022. Kebijakan teknis yang berkaitan tentang kesehatan sebagai tindak lanjut tentang PUG tertuang dalam Perbup

No. 463.23/02721 Tahun 2018 Tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

SK Bupati No. 440/309 Tahun 2015 Tentang Pembentukan *Crisis Center* Kesehatan Ibu dan Anak. SK Bupati No 440/109 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak. SK Bupati No. 440/687 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Brebes. SK Bupati No. 50/525 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kelangsungan Hidup, Perkembang, Perlindungan Ibu dan Anak kabupaten Brebes. SK Bupati No. 440/328.3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Audit Maternal dan Perinatal Ibu dan Bayi Kabupaten Brebes. SK Bupati No. 411.4/133 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kabupaten Brebes.

Sinergisitas antar OPD maka merujuk kepada Baperlitbangda yang berperan dalam memasukkan perencanaan KIA dalam anggaran responsif gender, sekaligus menjadi *leading sector* yang berperan untuk mempengaruhi *stakeholder* lainnya, seperti DP3KB yang melakukan FGD tentang gerakan sayang ibu lewat SK bupati No.414/241 Tahun 2018 kemudian pemberdayaan perempuan, sosialisasi kesehatan reproduksi dan penyuluhan KB; DINPERMADES pernah diilibatkan dalam kesehatan reproduksi di desa dan kelurahan serta kegiatan KIA di tingkat desa; DINSOS bagaian yang mengurus pembiayaan jaminan sosial dan PKH; DINDIKPORA berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dengan DP3KB; PU mengenai persoalan jalanan Brebes yang rusak dan belum di aspal menjadi kendala, kemudian pembangunan dua jembatan di desa Wlahar kecamatan Larangan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat desa mengakses Faskes tanpa menggunakan perahu rakit; DISDUKCAPIL mengurus percepatan akte kelahiran dan akta kematian; Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan ikut berperan dalam KIA melalui pemenuhan gizi bagi ibu dan anak terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Beberapa OPD dapat dikatakan ikut terlibat dalam kegiatan kesehatan ibu dan anak demi turunnya jumlah kasus AKI dan AKB di Brebes. Namun bentuk kegiatan pemberdayaan di desa maupun di kelurahan dianggap masih bersifat medis, belum secara aktif menyentuh ke masyarakat untuk memberikan kesadaran. Merubah karakter masyarakat memang masih menjadi kendala dan menuju perubahan memang butuh waktu serta proses yang panjang. Oleh karena itu, selain jabatan struktural di pemerintahan diperlukan pula keterlibatan aktif dari masyarakat karena dianggap mereka yang bisa bersentuhan langsung di level

bawah. Di Brebes melalui Forum Masyarakat Madani (FMM), Eska Unggul, FKKG Brebes dan forum kesehatan desa menjadi mitra bagi dinas kesehatan dan DP3KB untuk menjalankan kegiatan seperti sosialisasi penurunan AKI dan yang sedang gencar melalui gerakan *kawal wong meteng*.

Kegiatan yang dianggap inovatif dari dinas kesehatan ketika di tanya selain gerakan *kawal wong meteng*, menjawab sudah mulai memunculkan inovasi terkait gerakan masyarakat memanfaatkan buku KIA, *voice* KIA lewat *channel youtube* dinas kesehatan, kemudian wali ibu hamil yakni suami atau orangtua dari ibu hamil ikut diberikan sosialisasi terkait kesehatan ibu dan anak. Di mana kelas wali ibu hamil, untuk membuka pengetahuan bagi peran suami dan orangtua karena keduanya menjadi kunci dari tiap keputusan ibu hamil dan kesehatan bagi ibu dan anak.

Kehadiran Eska Unggul dan FMM sebagai mitra kerja dari dinas kesehatan Brebes menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut berkontribusi. Hal ini menjadi kunci dari keberhasilan kebijakan yang responsif gender di Brebes, khususnya program kesehatan ibu dan anak untuk menekan jumlah kasus AKI dan AKB di bawah kepemimpinan kepala daerah Idza Priyanti. Kemunculan LSM seperti Forum Masyarakat Madani (FMM) di Brebes pernah memberikan gagasan inisiatifnya agar setiap desa memiliki Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) di tahun 2013. Namun inisiatif tersebut belum terealisasi, hingga akhirnya mulai muncul Eska Unggul yang bergerak untuk kesehatan ibu dan anak sekaligus membantu menyukseskan gerakan *kawal wong meteng*. Bahkan di tahun 2021, sudah ada 30 desa intervensi untuk menurunkan kasus AKI dan AKB di Brebes.

Kegiatan yang dianggap inovatif dari dinas kesehatan ketika di tanya selain gerakan *kawal wong meteng*, menjawab sudah mulai memunculkan inovasi terkait gerakan masyarakat memanfaatkan buku KIA, *voice* KIA lewat *channel youtube* dinas kesehatan, kemudian wali ibu hamil yakni suami atau orangtua dari ibu hamil ikut diberikan sosialisasi terkait kesehatan ibu dan anak. Di mana kelas wali ibu hamil, untuk membuka pengetahuan bagi peran suami dan orangtua karena keduanya menjadi kunci dari tiap keputusan ibu hamil dan kesehatan bagi ibu dan anak.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan untuk ibu yang melahirkan bisa dirujuk di 38 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, terdapat 3 RSUD di Brebes yakni RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan RSUD Ketanggungan. Dari dinas kesehatan menyatakan bahwa pendekatan untuk akses pelayanan kesehatan dan rujukan sudah menggunakan Perjanjian Kerjasama (PKS) lintas batas dengan kabupaten/kota wilayah perbatasan dengan Brebes, seperti wilayah selatan dengan Rumah Sakit Ajibarang dan Margono di

Purwokerto. Seperti kecamatan Salem bisa ke Rumah Sakit Majenang. Kemudian di wilayah barat dapat ke RSUD Waled atau di wilayah Cirebon dengan rujukan BPJS. Namun demikian, berdasarkan pernyataan Khamili (MKIA) yang aktif menggerakkan di desa Kaligiri (salah satu kecamatan di wilayah selatan Brebes), PKS lintas batas sebenarnya belum terealisasi dan keinginan dari kalangan LSM, seperti Eska Unggul dan FMM ingin merealisasi PKS lintas batas di setiap rapat koordinasi (*coffee morning*)

Terkait anggaran, dinas kesehatan menjadi nomor satu yang mendapatkan alokasi anggaran terbanyak diantara OPD lain. APBD yang ditunjukkan untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tahun 2019 mencapai 3.544.910.000. Tahun 2020 jumlahnya 3.024.708.000. Tahun 2021 jumlahnya 3.339.451.000. Adapula dari APBN dan non-APBD, seperti UNICEF. Bahkan di level kelurahan atau desa yang terdapat pelaku usaha adakalanya memberikan 10% dari hasil penjualannya untuk KIA di desanya, seperti di desa Kaligiri kecamatan Sirampog lewat pelaku usaha beras hitam.

Untuk data, sistem informasi, dan bahan informasi merujuk ke Baperlitbangda sebagai *leading sector* dan yang mengurus perencanaan daerah. Dalam hal ini, sudah terbentuk forum data lintas OPD sudah terwujud dalam bentuk Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) dan sudah *terupdate* sejak 2018 untuk rencana anggaran 2019 sekaligus berlaku di periode kedua kepemimpinan Idza Priyanti sampai 2022. Dasar hukumnya terealisasi melalui SK Pembentukannya No. 50/0953 Tahun 2018 tentang pembentukan tim penyusun analisis situasi ibu dan anak kabupaten Brebes.

Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program ibu dan anak di Puskesmas yakni melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, *monitoring*, dan evaluasi serta pemenuhan sarana dan prasarana dari berbagai sumber dana. Hasil analisa dari dokumen ASIA menjadi acuan bagi OPD dalam menentukan program dan kegiatan terkait KIA dan atas dasar RKPD yang merupakan hasil dari Musrenbang dari level desa, kecamatan sampai kabupaten serta forum OPD. Selain itu RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Rincian program beserta anggaran yang terealisasi selama tahun 2019 berdasarkan data ASIA, semua OPD memang ikut terlibat dalam KIA demi menurunnya kasus AKI dan AKB.

Harus diakui, sebagian besar kebijakan terkait penanggulangan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes masih mengadopsi kebijakan pemerintah pusat. Peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep yang datang dari murni dari Kepala Daerah Idza Priyanti untuk penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Namun demikian, setidaknya Kepala

Daerah Idza Priyanti memiliki kemauan untuk memasukkan visi dan misinya terkait kesehatan ibu dan anak dalam menekan kasus AKI dan AKB. Selain itu, kemampuan (kapabilitas) untuk menggerakkan roda pemerintahan dari birokrasi yang telah melakukan inovasi dalam pelayanan publik yang diprakarsai oleh dinas kesehatan melalui gerakan *kawal wong meteng* untuk memberikan konseling dan pendampingan kepada ibu hamil sampai bayinya lahir dengan kondisi sehat. Selain itu, kelas wali ibu hamil yang ditunjukkan suami atau orangtua si ibu hamil untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan ibu, ibu hamil yang resiko tinggi serta edukasi terkait gizi sehat.

Dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, DP3KB berusaha menyukseskan program KB karena kontribusi AKI dan AKB karena 4 terlalu bagi ibu hamil, yakni terlalu dekat jarak melahirkan, terlalu sering, terlalu muda dan terlalu tua. Dinas Dukcapil melalui Perbup Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian dan layanan *online* yang saat ini terus berjalan untuk memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Progres lainnya yang mendapatkan dukungan dan diperkuat oleh legislatif terkait anggaran yang selalu mendorong agar dapat melancarkan dinas dalam mengimprovisasi dan sentuhan lain agar OPD yang bertanggung jawab bisa serius dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran untuk KIA.

Di level desa, dengan adanya Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan selaras dengan adanya SDGs desa yang salah satu indikatornya yakni desa sehat dan sejahtera. Hal ini, untuk menunjang sebagai desa inklusif terkait kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok rentan dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Dengan demikian, Kepala Daerah Idza Priyanti diuntungkan dengan inovasi dan kerja dari mesin birokrasi yang aktif, seperti gerakan *kawal wong meteng* dan kelas wali ibu hamil memperlihatkan pemerintah membuka ruang bagi peningkatan partisipasi masyarakat, agar secara sadar dan berkelanjutan bahwa kehamilan bukan semata-mata tanggung jawab perempuan melainkan peran suami dan juga orangtua guna mengatasi persoalan AKI dan AKB.

Evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kasus AKI dan AKB di Kabupaten Brebes memperlihatkan perlu adanya sinergi antar lembaga di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Mengingat sudah ada aturan hukum dan program terkait penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak yang dikeluarkan. Peran dari LSM, akademisi dan aktivis perempuan di Brebes memperlihatkan interaksi yang aktif dengan pemerintah daerah, seperti dalam acara *coffee morning* (rapat koordinasi), pendampingan KIA di tiap kecamatan

dari Eska Unggul, sosialisasi penurunan kasus kematian ibu dan anak, STIKES di Brebes yang ikut berperan memberikan penyuluhan ibu hamil di tiap trisemester.

Hal yang masih perlu dibangun adalah memperkuat sinergi dengan dunia usaha, salah satunya dalam bentuk alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di tiap kecamatan atau tingkat desa. Seperti yang dilakukan oleh desa Kaligi melalui pengusaha beras hitam dan pengumpulan dana Rp.2000 tiap KK untuk menyukseskan penurunan jumlah AKI dan AKB di desanya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi dan mendorong masyarakat baik ibu hamil ataupun wali ibu hamil terutama zona merah kasus AKI dan AKB untuk menanamkan hidup sehat, perbaikan gizi, kepercayaan yang masih melekat dan kunjungan ke faskes selama hamil. diperlukan upaya untuk menciptakan efek psikologis agar perempuan yang sedang hamil ingin bayinya sehat-ibunya sehat, ingin maju dan berubah agar tidak pasrah terhadap keputusan suami/orangtua karena masalah biaya karena sudah tersedianya jaminan persalinan terutama ibu hamil yang resti agar memanfaatkan yankes di faskes terdekat.

SIMPULAN

Penelitian kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan kepala daerah di Brebes memperlihatkan kepemimpinan yang lahir dari kalangan pebisnis dan kemunculannya karena ada faktor kekerabatan atau "familial ties" dari Ikmal Jaya mantan walikota Tegal. Temuan dari penelitian sejalan dengan kenyataan menguatnya oligarki di dalam politik lokal. Meskipun bagian dari oligarki lokal kemunculan perempuan di dalam Pilkada langsung memungkinkan untuk mempermudah bagi perempuan untuk mengatasi hambatan dari proses politik, seperti masuknya kedalam kader politik, informasi, keterampilan, pengalaman, dan persoalan uang.

Kedua, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, kepala daerah Brebes cenderung melibatkan partisipasi aktif kepada bawahannya untuk menyuarakan ide dan gagasannya dalam proses pengambilan keputusan. Serta adanya pendelegasian wewenang kepada bawahannya yang sifatnya praktis maupun realistik. Sehingga dapat dikatakan memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Dalam hal ini, peneliti sulit bertemu dengan Bupati Idza Priyanti karena tidak mau di wawancarai sehingga untuk melihat lebih jauh gaya kepemimpinan demokratis dari kepemimpinannya diperoleh melalui mitra kerjanya seperti Sekertaris

Daerah dan orang-orang yang terlibat di setiap rapat koordinasi dari OPD; Baperlitbangda, Dinas Kesehatan dan DP3KB serta LSM seperti FMM dan Eska Unggul.

Ketiga, dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), kepala daerah Brebes pernah mendapatkan Anugerah Eka Praya (APE) namun penghargaan tersebut tidak menunjukkan tingkat kesetaraan gender, misalnya saja persoalan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi apalagi di tahun 2020-2021. Di mana penghargaan tersebut hanyalah program dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah dan bentuk penghargaan tersebut hanya untuk memotivasi pemerintah daerah, di mana sosok kepala daerah adalah yang berwenang menjalankan PUG atas dasar Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG.

Keempat, karakteristik masyarakat Brebes dan persoalan AKI dan AKB, ada beberapa alasan, pertama karakteristik masyarakat Brebes yang terbagi secara topografi di mana penggunaan lebih cenderung responsif terhadap program kesehatan ibu dan anak, berbeda dengan wilayah pesisir yang cenderung keras dan susah untuk menjalin kerjasama dalam menyukseskan gerakan kawal wong meteng. Sehingga di dalam pemetaan kasus AKI dan AKB di Brebes wilayah pesisir menjadi zona merah yang tinggi kasus kematian ibu dan bayinya. Kemudian karakter budaya patriarki, seperti setiap keputusan harus menunggu suami. Selain masih kuatnya kepercayaan atau mitos yang berkembang sehingga menjadi tantangan di dalam menjalankan setiap program untuk menurunkan AKI dan AKB di Brebes.

Kelima, kajian ini menemukan kapasitas kepala daerah Brebes dalam agenda kesetaraan gender melalui persoalan kesehatan ibu dan anak sebagai agenda prioritas. Kepala daerah Idza Priyanti diuntungkan dengan mesin birokrasi yang melakukan inovasi dan pendekatan akses dan pelayanan yang dinamis untuk kesehatan ibu dan anak. Selain itu, berdasarkan observasi dan pengamatan selama penelitian, LSM di Brebes seperti Eska Unggul dan FMM lebih aktif dalam memberikan masukan dan menjalin komunikasi serta kontribusi aktif. Hal ini menunjukkan terjalannya mitra kerja yang aktif untuk kesehatan ibu dan anak. Tentunya ini menjadi hal positif untuk kinerja kepala daerah dalam menurunkan kasus AKI dan AKB di Brebes, dan mencerminkan implementasi kebijakan dalam kesehatan ibu dan anak.

Keenam, kebijakan yang responsif gender sebagai bagian dari mewujudkan PUG dipengaruhi pula modal sosial dan politik dari kepala daerah. Modal tersebut ternyata memberikan konsekuensi partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan responsif gender berupa

kehatan ibu dan anak di Brebes. aspek-aspek seperti “jaringan” mulai dari adanya ikatan kekerabatan yang memunculkan dan kemenangannya Idza Priyanti di Pilkada langsung 2012. Serta kajian ini menemukan jaringan Idza Priyanti dalam partisipasi aktif di masyarakat masih minim, jaringan yang dibentuk mulai dibangun pada saat dirinya menjabat di periode pertama (2012-2017). “Norma timbal balik” meskipun sempat tidak mendapatkan dukungan dari organisasi perempuan karena dianggap kurang mumpuni menjadi pemimpin, nyatanya organisasi perempuan dan Idza Priyanti menjalin komunikasi yang baik karena menganggapnya sebagai mitra kerja untuk pemberdayaan masyarakat serta pengalokasian dana yang selalu lancar. Menariknya, temuan penelitian ini identitas tunggalnya sebagai perempuan tidak mengalami kendala yang serius di tengah masyarakat Brebes yang mayoritas Islam dan masih dominan budaya Patriarkinya. Sehingga mendapatkan “kepercayaan” bagi kalangan organisasi perempuan, seperti GOW, Sekar Tantri, Muslimat NU, Aisiyah.

UCAPAN TERIMAKASIH

SARAN

Pertama, kepemimpinan kepala daerah bukan hanya sekadar memasukkan visi misi dan program kerja terkait bidang-bidang yang ingin di selesaikan di bawah kepemimpinannya, tetapi mampu mengejawantahkan agenda prioritasnya yang dimasukkan kedalam RPJMD terutama persoalan kematian ibu dan anak untuk menurunkan kasus AKI dan AKB di daerah untuk menciptakan kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Kedua, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan perempuan harus menonjolkan sifat sensitifitas gender, terutama persoalan kesehatan ibu dan anak untuk menekan jumlah AKI dan AKB. Penghargaan APE selayaknya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan memiliki program atau kegiatan dari inisiatif perempuan kepala daerah.

Ketiga, kepala daerah mampu menjalin kerjasama yang baik dengan asosiasi masyarakat, terutama kalangan akademisi, organisasi perempuan, aktivis dan LSM yang bergerak di level desa. Hal ini menjadi jejaring dan modal sosial untuk membangun mitra kerja yang baik bahkan memunculkan konsep, ide atau gagasan untuk kebijakan yang inovatif dalam menurunkan kasus AKI dan AKB.

Keempat, membangun program pendampingan yang kuat melalui motivator KIA di level desa. Bagaimana pun, perlu memunculkan aktor politik di level bawah untuk memberdayakan, memfasilitasi dan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak secara intensif. Gerakan untuk mendampingi

dan motivator KIA hanya sebatas gerakan biasa apabila tidak ada aktor penggerak di level desa. Apalagi jika masa jabatan kepemimpinannya sudah habis, maka belum tentu program dan kegiatan yang sebelumnya akan tetap dilanjutkan. Selain itu, kelas wali ibu hamil untuk menyentuh keterlibatan langsung dari suami dan orangtua untuk menyentuh persoalan struktural dalam relasi gender dari laki-laki dan perempuan.

Kelima, pemerintahan daerah perlu diberikan program khusus untuk pelaksanaan PUG, hal ini untuk menciptakan kesetaraan gender dan memunculkan sifat sensitifitas gender di kalangan eksekutif maupun legislatif; apalagi bagi mereka yang belum memunculkan agenda prioritas untuk mencapai kesetaraan gender di daerahnya. Urgensinya untuk memberi penyadaran terkait pentingnya dalam mewujudkan PUG bukan sekadar mengerjakan program pusat dan mengejar penghargaan, melainkan memunculkan inisiatif untuk kebijakan dan inovasi dalam program-program dibawah kepemimpinannya. Dengan demikian, ada orientasi dalam pemberdayaan masyarakat dan lebih dekat lagi dengan upaya pemberdayaan perempuan dari jabatan struktural di pemerintahan.

Keenam, Bukan hanya kepala daerah untuk diberikan pendekatan kapabilitas yang berperspektif gender tetapi pemerintahan di desa, seperti kepala desa, ketua PKK, bidan desa, aparat desa setempat, untuk berpartisipasi aktif, mengontrol dan mewujudkan kesetaraan gender. Apalagi dengan adanya SDGs Desa dan dikeluarkannya Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Partisipasi aktif perempuan dan pemerintah di desa, seperti rapat desa, musrembangdes, sosialisasi terkait KIA dan kegiatan PKK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini, seperti: Nurul Aeny, S.KM. (Dinas Kesehatan), Emastoni S.H., M.H.. (Mantan Sekda), Muhammad Rizky Ubaidillah, S. Psi. (Komisi IV DPRD Brebes), Eny Listiana, S.I.P. (DP3KB), Harnie Antiek Triana, S.T. (Baperlitbangda), Dra. Hj. Aqilatul Munawaroh, M. Pd. (Ketua GOW), Rizky Fajar, S.H.(FMM), Khalimi (Penggerak KIA Desa Kaligiri) dan Dr. Sofa Marwah, M.Si. (Akademisi dari UNSOED). Serta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan mulai dari proses penyusunan dan penelitian ini, kepada Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D., dan Dr. Ratnia Solihah, S.I.P., M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Afshar, H. (2005). *Women and Politics in the Third World*. New York: Routledge.

- Alfian, M. A. (2012). SERI KEPEMIMPINAN POLITIK KEKUATAN PEMIMPIN: Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Graha Grafindo.
- Alfian, M. A. (2017). Wawasan Kepemimpin
- Aminah, S., & Roikan. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Arafat, Y. (2020, Juli 24). Genjot IPG dan IDG Butuh Komitmen dan Penganggaran Responsif Gender. Retrieved Desember 12, 2020, from [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id): <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/genjot-ipg-dan-idg-butuh-komitmen-dan-penganggaran-responsif-gender/>.
- Baperlitbangda. (2018, Desember). Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Berbasis HAM Kabupaten Brebes Tahun 2018.
- Dewi, K. H., & Raharjo, S. N. (2020). Pola Kandidasi & Kebijakan Responsif Gender Perempuan Kepala Daerah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, K. H. (2017). Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Press.
- Dewi, K. H., Aziz, N. L., & Raharjo, S. N. (2020). Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Dinas Kesehatan. (2020, Maret 26). BPS Kabupaten Brebes. Banyaknya Kelahiran Bayi, Kematian Bayi, Ibu Melahirkan dan Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2019. Retrieved Desember 7, 2020, from [Brebeskab.bps.go.id](http://brebeskab.bps.go.id): <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2020/03/26/1088/banyaknya-kelahiran-bayi-kematian-bayi-ibu-melahirkan-dan-kematian-ibu-melahirkan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-tahun-2019.html>.
- Karimi, K. L. (2016). Role Of Leadership In Gender Mainstreaming: A Case Of Ministry Of Education, Machakos Cuntry. *International Journal of Scientific Reseach and Innovative Technology* ISSN: 231-3759 Vol.3 No.12, 1-9.
- Kartodiharjo, H. (2017). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Diskursus Politik Aktor Jaringan. Bogor: Sajogyo
- Kemenpppa. (2019, Juni 25). Komitmen Pemimpin Daerah Kunci Keberhasilan Pengarusutamaan Gender. Diambil kembali dari [Kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id): <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2168/komitmen-pimpinan-daerah-kunci-keberhasilan-pengarusutamaan-gender>
- Redaktur Brebes News. (2013, Desember 18). Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, SE., MH. menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Utama. Dipetik Agustus 4, 2019, dari [Brebes.go.id](http://brebeskab.go.id): <http://brebeskab.go.id/index.php/14-data-articles/1040-bupati-brebes-hj-idza-priyanti-se-mh-menerima-penghargaan-anugerah-parahita-ekapraya-tingkat-utama?fbclid=IwAR3bdmOKkxVW4fXXyKe4H7amwjKhuAqofYq9jYDxuQMYrgWnz71ze8L6aeg>.
- Redaktur Brebes News. (2019, Juli 22). Lagi, Brebes Terima Anugerah KLA 2019. Retrieved Agustus 4, 2019, from [Brebesnews.co](http://brebesnews.co): <https://brebesnews.co/2019/07/lagi-brebes-terima-anugerah-kla-2019/>
- Sulopo, H. (2003). Pengantar Kualitatif dan Dasar-Dasar Teoritis. Surakarta: Pusat Peneliti UNS.